

14	Abadi	Kurai	Tanjung Anau	Inti	APBD 2018
15	Sarasah Murai	Harau	Harau	Inti	APBD 2019
16	Bulakan Sakato	Tanjung Gadang	Lareh Sago halaban	Replikasi	APBN 2010
17	Tunas Bakti	Tanjung Gadang	Lareh Sago halaban	Replikasi	APBN 2010
18	Kampai Saiyo	Sitanang	Lareh Sago halaban	Replikasi	APBN 2010
19	Lambung Saiyo	Labuah Gunuang	Lareh Sago halaban	Replikasi	APBN 2010
20	Sago Sakato	Labuah Gunuang	Lareh Sago halaban	Replikasi	APBN 2010
21	Sayang Ibu	Sitanang	Lareh Sago halaban	Replikasi	APBN 2010

*Tabel 26. Nagari Mandiri Pangan di Kabupaten Lima tahun 2020*

Tujuan Pencapaian sasaran strategis ” Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat” dengan Indikator Kinerja Utama jumlah Nagari Mandiri Pangan adalah 4 Nagari. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan **Sangat Tinggi**. Hal ini dilihat dari target jumlah Nagari Mandiri Pangan yang baru pada tahun 2020 adalah 4 Nagari, namun pencapaiannya adalah 4 Nagari.

Harga dan pasokan pangan merupakan indikator strategis yang saling terkait dan sering digunakan untuk mengetahui a) status distribusi pangan, b) permasalahan yang disebabkan oleh rantai distribusi pangan, c) ketidakcukupan pasokan pangan di suatu wilayah. Permasalahan utama yang terjadi selama ini adalah tingginya disparitas harga antara produsen dan konsumen yang mengakibatkan keuntungan tidak proporsional antara pelaku usaha. Harga yang tinggi di tingkat konsumen tidak menjamin petani (produsen) mendapatkan harga yang layak, sehingga diperlukan keseimbangan harga yang saling menguntungkan, baik ditingkat produsen maupun konsumen.

Sebagai solusi dalam mengatasi disparitas harga pangan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Pangan melakukan terobosan dengan kegiatan “Warung Pangan Mandiri” (Paman). Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis dan efisiensi rantai distribusi pemasaran dengan memperpendek rantai pasok. Selain itu, Warung PAMAN diharapkan dapat memenuhi penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) bagi masyarakat sesuai dengan amanat Perda Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 1 tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan.

Kegiatan Warung PAMAN secara tidak langsung berperan dalam mengatasi anjloknya harga pada masa panen raya dan tingginya harga pada saat paceklik.

Warung PAMAN dimungkinkan menjadi tempat/wadah promosi/penjualan bagi Kelompok tani/Gapoktan/kelompok KRPL binaan maupun produsen pangan lainnya yang mempunyai komitmen bagi stabilisasi harga dan pasokan untuk memasarkan komoditas pangan hasil produksi pertanian/peternakan khususnya beras, cabe merah keriting, bawang merah dan telur yang diproduksi langsung dari pertanian serta komoditas pangan lainnya. Keberadaan Warung PAMAN diharapkan mampu memangkas mata rantai distribusi komoditas pangan yang dipasarkan langsung melalui Warung PAMAN sehingga harga dapat selalu dikendalikan lebih rendah dari harga pasar. Oleh sebab itu pada setiap Desa/nagari Mandiri Pangan tahap penumbuhan di sediakan satu unit Warung Pangan Mandiri (warung PAMAN).

### **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Efisiensi = Input Target/Input Aktual  $\geq$  1

- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2020		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2020		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Jumlah Nagari Mandiri Pangan	4 Nagari	4Nagari	100%	171.445.000	159.902.600	93,26
Persentase kinerja	rata-rata capaian		100%	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		93,26
<b>Tingkat Efisiensi =</b>			<b>1,07 ( efisiensi tercapai)</b>			

Tabel 27. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Dokumentasi Desa Mandiri Pangan / Warung Pangan Mandiri



Gambar 14. Warung PAMAN Kelompok Sarasah Murai



gambar 15. Aktivitas di Warung PAMAN



Gambar 16. Pertemuan Evaluasi DMP Ngarai Indah



gambar 17. Kondisi Warung PAMAN

## 1 Sasaran Strategis 2

### Sasaran Strategis 2

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ke t
1.	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	75,5	71,5	75,4	73,5	81,7	
2	2. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	95%	85%	100% 88%	90%	0	

Tabel 28. Sasaran strategis 2

**a. Indikator Kinerja 1: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi**

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ke t
1.	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	75,5	71,5	75,4	73,5	81,7	

Tabel 29. Skor Pola Pangan Harapan

Dari tabel diatas dapat kita lihat peningkatan jumlah PPH dari tahun 2019 yaitu dari 75,4 pada tahun 2020 meningkat menjadi 81,7. Dimana artinya semakin beragam konsumsi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun sebelumnya.

Konsumsi pangan merupakan banyaknya atau jumlah pangan, secara tunggal maupun beragam, yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis dan sosiologis. Tujuan fisiologis adalah upaya untuk memenuhi keinginan makan (rasa lapar) atau untuk memperoleh zat-zat gizi yang diperlukan tubuh. Tujuan psikologis adalah untuk memenuhi kepuasan emosional atau selera, sedangkan tujuan sosiologis adalah untuk memelihara hubungan manusia dalam keluarga dan masyarakat. Konsumsi pangan merupakan faktor utama untuk memenuhi kebutuhan gizi yang selanjutnya bertindak menyediakan energi bagi tubuh, mengatur proses metabolisme, memperbaiki jaringan tubuh serta untuk pertumbuhan.

Konsumsi, jumlah dan jenis pangan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi konsumsi pangan adalah jenis, jumlah produksi dan ketersediaan pangan. Untuk tingkat konsumsi, lebih banyak ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi. Kualitas pangan mencerminkan adanya zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh yang terdapat dalam bahan pangan, sedangkan kuantitas pangan mencerminkan jumlah setiap gizi

dalam suatu bahan pangan. Untuk mencapai keadaan gizi yang baik, maka unsur kualitas dan kuantitas harus dapat terpenuhi.

pemanfaatan atau konsumsi pangan merupakan salah satu *entry point* dan *sub system* untuk memantapkan ketahanan pangan. Dengan mengetahui pola konsumsi pangan masyarakat akan dapat disusun kebijakan terkait dengan penyediaan pangan, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor. Kebijakan produksi pangan mencakup berapa volume dan jenis pangan yang mampu diproduksi dengan memperhatikan sumberdaya lahan, air, teknologi dan sarana pendukung lainnya. Dengan memperhatikan potensi produksi dan permintaan pangan akan dapat ditetapkan berapa banyak dan jenis pangan yang harus diproduksi di dalam negeri atau diimpor. Selain itu dengan mengetahui perubahan konsumsi pangan masyarakat, juga dapat disusun kebijakan harga dan distribusi pangan agar masyarakat dapat menjangkau pangan yang tersedia. Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang utama dan merupakan sumber beragam zat gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk memenuhi kebutuhan fisiologi tubuh agar manusia dapat hidup sehat dan produktif. Oleh karena itu disadari bahwa gizi merupakan unsur yang sangat penting dalam membentuk kualitas manusia.

Untuk melihat pola atau tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat dapat diukur melalui suatu sistem Pola Pangan Harapan (PPH). Pola pangan harapan (PPH) adalah suatu komposisi pangan yg seimbang untuk dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk. Pola pangan harapan ini mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif, untuk menghasilkan suatu komposisi normal atau standar pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi penduduk. sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutricional balance*), cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kualitas dan kemampuan daya beli (*affordability*).

Oleh karena itu untuk hidup sehat telah ditetapkan pola pangan harapan yang ideal dimana konsumsi 9 kelompok bahan pangan dengan skor Pola Pangan Harapan sebesar 100 seperti yang terlihat pada tabel berikut ;

## Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Ideal

Standar PPH Ideal 2015		Nasional			Regional*)		
Standar Analisis Kualitas Konsumsi	Kelompok Pangan	%AKE	Bobot	Skor	%AKE	Bobot	Skor
	Padi-padian	50%	0,5	25,0	45%	0,5	22,0
	Umbi-umbian	6%	0,5	2,5	12%	0,5	6,0
	Pangan Hewani	12%	2,0	24,0	12%	2,0	24,0
	Minyak & Lemak	10%	0,5	5,0	10%	0,5	5,0
	Buah/Biji Bminyak	3%	0,5	1,0	2%	0,5	1,0
	Kacang-kacangan	5%	2,0	10,0	5%	2,0	10,0
	Gula	5%	0,5	2,5	5%	0,5	2,0
	Sayur & Buah	6%	5,0	30,0	6%	5,0	30,0
	Lain-lain	3%	0,0	0,0	3%	0,0	0,0
<b>Total</b>	<b>100%</b>		<b>100,0</b>	<b>100%</b>		<b>100,0</b>	

Nilai capaian peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH), adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semaktingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang. Penghitungan angka PPH melalui olahan beberapa tahapan. Secara garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\% \text{ AKE} = \frac{\text{Konsumsi energi aktual (kcal/kap/hari)}}{2000 \text{ kkal/kap/hr}} \times 100 \%$$

$$\text{Skor AKE} = \sum (\% \text{ AKE} \times \text{bobot perkelompok makanan})$$

Skor PPH (skor AKE dibandingkan dengan skor Maks, jika  $\text{AKE} > \text{skor maks}$  maka diambil maka yang dijadikan skor PPH perkomoditi adalah angka skor maks, apabila  $\text{AKE} < \text{skor maks}$  maka skor PPH yang digunakan adalah %AKE

Kualitas konsumsi pangan ditentukan oleh berbagai faktor antara lain, dari komposisi konsumsi pangan masyarakat berdasarkan kontribusi energi setiap kelompok pangan yang dikombinasikan dengan tingkat kecukupan energinya. Penilaian kualitas dan mutu konsumsi pangan seperti ini dilakukan dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencerminkan keseimbangan komposisi kelompok pangan dan zat gizi yang dikonsumsi.

**Nilai/skor mutu PPH ini juga dapat memberikan informasi mengenai pencapaian kualitas ragam (diversifikasi) konsumsi pangan. Semakin besar skor PPH maka kualitas konsumsi pangan dalam artian jumlah dan komposisi dinilai semakin baik.**

Skor PPH penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	332,0	1.367,0	61,3	65,1	0,5	30,7	32,6	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	39,7	36,0	1,6	1,7	0,5	0,8	0,9	2,5	0,9
3	Pangan Hewani	120,0	280,0	12,5	13,3	2,0	25,1	26,6	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	29,9	269,0	12,1	12,8	0,5	6,0	6,4	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	9,7	52,0	2,3	2,5	0,5	1,2	1,2	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	12,3	29,0	1,3	1,4	2,0	2,6	2,8	10,0	2,8
7	Gula	16,3	62,0	2,8	2,9	0,5	1,4	1,5	2,5	1,5
8	Sayur dan Buah	219,0	91,0	4,1	4,3	5,0	20,3	21,6	30,0	21,6
9	Lain-lain	82,9	45,0	2,0	2,1	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>		<b>2.230,0</b>	<b>100</b>	<b>106,2</b>		<b>88,1</b>	<b>93,5</b>	<b>100,0</b>	<b>81,7</b>

Tabel 30. Skor PPH penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

Dari tabel diatas angka PPH 2020 adalah sebesar 81,7 dimana PPH tahun 2020 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 73,5. Namun Skor PPH tersebut menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan masih belum begitu beragam serta belum mencerminkan keseimbangan gizi antar kelompok pangan. Hal ini terlihat dari adanya beberapa komoditi pangan yang skornya masih di bawah skor ideal dimana hal ini menggambarkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin jauh dari keragaman dan keseimbangan konsumsi yang dianjurkan sesuai dengan Pola Pangan Harapan. Oleh sebab itu pemahaman tentang pentingnya pola konsumsi pangan yang Beragam, bergizi seimbang dan aman perlu semakin ditingkatkan melalui sosialisasi, penyuluhan, pemberdayaan kelompok wanita serta peningkatan pelaksanaan kegiatan optimalisasi

pemanfaatan pekarangan guna meningkatkan ketersediaan dan akses pangan masyarakat serta menunjang percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Untuk peningkatan capaian kinerja maka Dinas Pangan kabupaten Lima Puluh kota melaksanakan program ketahanan pangan dengan memfasilitasi kelompok wanita tani untuk pemanfaatan pekarangan dengan aneka tanaman sayuran maupun buah-buahan serta budidaya ternak yang hasilnya dapat dikonsumsi oleh keluarga sehingga status gizi dapat lebih baik.

Secara umum keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi pada tahun 2020 telah melebihi yang ditargetkan. Keberhasilan berdasarkan analisis situasi konsumsi pangan dilakukan pada aspek kuantitas dan kualitas. Kuantitas konsumsi pangan diindikasikan oleh tingkat konsumsi energi. Sementara itu, kualitas konsumsi pangan dilihat dengan menggunakan indikator PPH. Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan antara lain : a. Telah dilakukannya promosi dan sosialisasi ke masyarakat terkait diversifikasi pangan guna mendukung kebijakan Nasional tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). b. Pemberian pelatihan pengolahan dan pendampingan cara mengolah pangan lokal kepada ibu rumah tangga dan kelompok wanita tani (KWT) guna mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). c. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk mengembangkan pola pikir masyarakat secara khusus ibu rumah tangga dan keluarga sesuai konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dilakukan untuk memenuhi ketersediaan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). Selain terdapatnya penyebab keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja meningkatnya ketahanan pangan. Adapun penyebab kegagalan/kendala dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Masih tingginya konsumsi beras di masyarakat, pola konsumsi pangan masyarakat masih ketergantungan pada komoditas tertentu yaitu beras.
- b. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen terhadap keamanan pangan segar maupun olahan.
- c. Kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas sehingga cenderung menghasilkan kegiatan yang statis dari tahun ke tahun



Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut antara lain :

- a. Meningkatkan kampanye dan sosialisasi diversifikasi pangan (optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan pangan yang bergizi, beragam, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal).
- b. Pemberian mesin untuk mengolah pangan lokal dan pendampingan cara mengolah pangan lokal kepada ibu rumah tangga dan kelompok wanita tani (KWT) guna mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).
- c. dilaksanakannya pengawasan keamanan pangan segar melalui monitoring dan pengujian sampel.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis, dengan menggunakan rumus efisiensi biaya/anggaran =  $(\text{realisasi capaian kinerja} - \text{realisasi anggaran}) \times 100\%$  Adapun efisiensi sumberdaya biaya/anggaran masing – masing sasaran dapat disajikan dalam tabel berikut :

Keberhasilan pencapaian pembangunan ketahanan pangan di daerah, dipengaruhi oleh peran serta unit kerja Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat serta OPD terkait yang menjadi anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut beberapa kegiatan yang mendukung ketahanan pangan di daerah yang berupa dana dekonsentrasi, yaitu : Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Kegiatan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk mengembangkan pola pikir masyarakat secara khusus ibu rumah tangga dan keluarga sesuai konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dilakukan untuk memenuhi ketersediaan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dengan memanfaatkan pekarangan sebagai penyedia sumber pangan keluarga yang sehat dan aman dari bahan tidak berbahaya untuk mendapatkan konsumsi dari karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Pemanfaatan pekarangan dilaksanakan

dengan usaha tani secara terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan serta arahan menuju pada tahap kemandirian. Dari kegiatan ini ada 2 kelompok untuk tahap pengembangan dengan anggaran Rp. 15.000.000,- untuk masing-masing kelompok dan 6 kelompok tahap penumbuhan dengan anggaran Rp. 50.000.000,- untuk masing-masing kelompok yang berupa dana hibah dari pemerintah pusat yang langsung masuk ke rekening kelompok masing-masing. Kelompok Wanita Tani untuk tahap Pengembangan, yaitu :

1. kelompok Wanita Tani Saiyo Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh
2. kelompok Wanita Tani Sehati Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh
3. kelompok Wanita Tani Payung organik Nagari Pandam gadang Kecamatan Gunuang Omeh
4. kelompok Wanita Tani Suka Maju Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan
5. kelompok Wanita Tani Bougenvil Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru
6. kelompok Wanita Tani Restu Bunda Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX
7. kelompok Wanita Tani Wirajaya Nagari Sarilamak Kecamatan Harau
8. kelompok Wanita Tani Hidayah Nagari Taram Kecamatan Harau

#### **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Efisiensi =  $\text{Input Target} / \text{Input Aktual} \geq 1$

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2020		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2020		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	14 Nagari	13 Nagari	92%	48.725.000	45.755.000	93,90
Persentase rata-rata capaian kinerja			92%	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		93,90
<b>Tingkat Efisiensi =</b>			<b>0,97 ( efisiensi tidak tercapai)</b>			

Tabel 31. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

### Dokumentasi kegiatan Pemanfaatan Pekarangan



Gambar 18. Rumah Bibit P2L



gambar 19. Demplot P2L



Gambar 20. Pertamanan P2L



gambar 19. P2L KWT Bougenvil



Gambar 21. Pertamanan P2L



gambar 22. Pertamanan P2L



Gambar 23. Demplot P2L



gambar 24. Rumah Bibit P2L

**b. Indikator Kinerja 1: Persentase pangan segar yang dinyatakan aman hasil pemeriksaan laboratorium**

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ke t
1.	Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	95%	85%	100% 88%	90%	0%	

Tabel 32. Persentase pangan segar yang dinyatakan aman

Dilihat ada tabel diatas pada tahun 2020 realisasi pencapaian target 0 hal ini disebabkan adanya refocussing dana APBD pada tahun 2020 hal ini disebabkan karena adanya wabah COVID 19 sehingga dana APBD harus dialihkan untuk penanggulangan bencana tersebut.

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lainnya

yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan disebutkan bahwa pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sangat penting bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta kecerdasan masyarakat. Masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang merugikan dan / atau membahayakan kesehatan.

Saat ini permasalahan keamanan pangan yang masih menjadi perhatian utama antara lain, sering terjadinya kasus keracunan makanan, produk pangan segar kalah bersaing di pasaran akibatnya komoditi tersebut melebihi Batas Maksimum Residu (BMR), kurangnya pengawasan terhadap produk impor, penerapan sistem mutu yang belum mantap serta belum adanya pemantauan dan pengawasan secara terpadu oleh instansi terkait.

Keamanan pangan merupakan aspek yang luas, dimana harus melibatkan beberapa stakeholder terkait untuk mencapai tujuan dalam penanganannya yang mencakup produsen, konsumen dan unsur pengawas dan aparat. Keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, produsen dan masyarakat. Untuk itu diperlukan konsep “terpadu” agar setiap pihak dapat berperan dalam rangka meningkatkan keamanan pangan.

Salah satu tugas dan wewenang yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam hal keamanan pangan antara lain :melakukan pengawasan pangan segar yang beredar dan pengujian berkaitan dengan mutu dan keamanan pangan, melakukan monitoring mutu dan keamanan pangan baik segar maupun olahan serta pengakuan (sertifikasi dan registrasi) kepada pelaku bisnis pangan. Dinas Pangan merupakan salah satu instansi yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menjalankan fungsi pemantauan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat.

Pangan segar yang beredar di pasar baik yang berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota maupun dari luar Daerah belum tentu terjamin dari cemaran residu bahan kimia (pestisida, formalin, dll). Guna mendeteksi dan mengendalikan jumlah / tingkat cemaran residu bahan kimia baik cemaran fisik dan biologi

lainnya yang beredar di masyarakat perlu dilakukan pengawasan keamanan pangan serta dengan melakukan uji laboratorium terhadap pangan segar tersebut.

Dari indikator ini diharapkan kondisi keamanan pangan segar yang beredar di masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meningkat, oleh karena itu dilaksanakan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan segar. Dalam hal ini dilakukan pengawasan dan pengambilan sampel terhadap pangan segar yang beredar di masyarakat. Sampel pangan segar yang ada di tengah masyarakat (pasar tradisional) diuji di laboratorium dan juga ada yang langsung diuji dilapangan sehingga dapat diketahuui cemaran yang bisa mempengaruhi bahan pangan tersebut.

Namun pada tahun 2020 ini untuk pemeriksaan laboratorium ataupun uji lapangan tidak bisa dilakukan, hal ini disebabkan karena pemotongan/refocussing anggaran yang dipergunakan untuk penanggulangan bencana virus covid 19. Dana yang direfocussing diantaranya pembelian bahan untuk pengujian laboratorium dan lapangan, dan biaya pengujian laboratorium serta biaya perjalanan tim untuk melakukan uji sampel dilapangan.

#### **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \text{Input Target} / \text{Input Aktual} \geq 1$$

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2020		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2020		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Persentase sampel pangan	90%	0	0%	17.355.000	15.505.000	89,34

segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan						
Persentase rata-rata capaian kinerja	0%	Persentase rata-rata penyerapan anggaran	89,34			
<b>Tingkat Efisiensi =</b>		<b>0 (efisiensi tidak tercapai)</b>				

Tabel 32. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

### 1. Strategis 3

#### Sasaran Strategis 3

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1	Nilai Evaluasi AKIP		65	61,91	70	65,25	

Tabel 33. Sasaran Strategis 3

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya peningkatan Nilai dari tahun 2019, namun seiring dengan itu juga ada peningkatan target yang ditetapkan dari tahun sebelumnya sehingga pencapaian masih dibawah 100%.

Evaluasi AKIP merupakan alat dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi AKIP diperlukan bagi setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perencanaan organisasinya. Oleh sebab itu diharuskan untuk setiap instansi menyusun Laporan Kinerja yang merupakan penjabaran akuntabilitas atas perencanaan strategis instansi yang meliputi Pernyataan Penetapan Perjanjian Kinerja, RKT dan Renstra.

Pengategorian peringkat ini dapat diartikan interpretasi dan karakteristik instansinya sebagai berikut :

NO	SKOR	NILAI	INTERPRESTASI DAN KARAKTERISTIK INSTANSI
1.	> 85	AA	Memuaskan: Memimpin perubahan, 100 berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan akuntabel, perlu terus berinovasi
2.	> 75-85	A	Sangat Baik: Akuntabilitas kinerjanya baik, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, menggunakan knowledge management untuk membangun

			budaya berkinerja, perlu banyak inovasi
3	> 65-75	B	Baik: akuntabilitas kerjanya baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu sedikit perbaikan untuk systems dan perlu banyak berfokus perbaikan soft systems
4.	> 50-65	CC	Cukup Baik (memadai): Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja bagi pertanggungjawaban, tapi perlu banyak perbaikan, termasuk sedikit perbaikan yang mendasar
5.	>30-50	C	Agak Kurang: Memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi kurang dapat diandalkan, perlu banyak perbaikan dan termasuk perbaikan yang mendasar
6	0-30	D	Kurang: sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

Tabel 34. Pengategorian peringkat ini dapat diartikan interpretasi dan karakteristik instansinya

Pada tahun 2020 yang penyusunan Laporan tahun 2019 Dinas Pangan memiliki rincian Nilai Sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	21,34
2	Pengukuran Kinerja	13,75
3	Pelaporan Kinerja	10,42
4	Evaluasi Internal	5,2
5.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	14,54
	<b>Total</b>	<b>65,25 (B)</b>

Tabel 35. Rincian Nilai Laporan tahun 2019

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dinas Pangan memperoleh nilai 65,25 dengan kategori peringkat B, Baik dengan pengertian akuntabel kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan, dengan rincian sebagai berikut :

#### B. Perencanaan Kinerja

1. Untuk Komponen Perencanaan Kinerja khususnya dokumen perencanaan strategis, Dinas Pangan telah memiliki dokumen Renstra tahun 2016-2021. Renstra ini belum memuat tujuan yang dilengkapi dengan ukuran keberhasilan dan belum memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik serta belum menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan dan dalam hal Impementasinya khususnya yang menyangkut



implementasi terhadap target jangka menengah dalam Renstra diketahui belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan serta direviu secara berkala.

2. Untuk Perencanaan Kinerja telah disusun dan telah menyajikan IKU dan telah dipublikasikan. Sasaran juga telah berorientasi hasil dan memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik. Rencana Aksi telah disusun dan mencantumkan target secara periodik atas kinerja, namun belum optimal monitoringnya secara berkala dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

#### C. Pengukuran Kinerja

1. Untuk komponen pengukuran kinerja ini, Dinas Pangan telah mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal namun mekanisme pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya terlaksana dan dapat diandalkan dan belum dilaksanakan secara berkala.
2. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dikembangkan menggunakan teknologi informasi.
3. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan/dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.

#### D. Pelaporan Kinerja

1. Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumberdaya.
2. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dan digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

#### E. Evaluasi Internal

1. Pemantauan Rencana Aksi belum optimal dilaksanakan untuk mengendalikan kinerja sehingga alternatif perbaikan tidak dapat dilaksanakan.
2. Hasil evaluasi program belum seluruhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan dimasa yang akan datang.
3. Hasil evaluasi Rencana Aksi belum menunjukkan langkah nyata.

#### F. Pencapaian sasaran/kinerja organisasi

Target pada umumnya telah dapat dicapai dengan baik dari tahun sebelumnya

Berdasarkan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah direkomendasikan sebagai berikut :

#### A. Perencanaan Kinerja

1. Agar tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator). Ukuran keberhasilan merupakan ukuran atau parameter terukur yang merepresentasikan tercapainya/terwujudnya atau tidaknya tujuan yang ditetapkan.
2. Agar Target Jangka Menengah dalam Renstra dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan dengan mengacu pada kriteria sebagai berikut :
  - a. Terdapat breakdown target jangka menengah kedalam target-target tahunan dan periodik yang selaras dan terukur.
  - b. Terdapat pihak atau bagian yang bertanggung jawab untuk melaporkan dan yang memonitor kinerja secara periodik.
  - c. Terdapat jadwal, mekanisme SOP yang jelas tentang Mekanisme monitoring Renstra Secara Periodik.
  - d. Terdapat dokumentasi hasil monitoring/capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progresnya dalam laporan kinerja.
  - e. Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring.
3. Rencana Aksi yang telah dimonitor pencapaiannya secara berkala agar memperhatikan jika terdapat deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusi dan terdapat mekanisme dan implementasi reward dan punishment terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan dan dimanfaatkan untuk penyusunan kinerja sampai tingkat eselon III dan IV.

#### B. Pengukuran Kinerja

1. Agar melaksanakan pengumpulan data kinerja sesuai dengan mekanisme pengumpulan data yang memadai dengan kinerja sebagai berikut :
  - a. Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date.
  - b. Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid.

- c. Adanya kemudahan untuk mengakses data bagi yang berkepentingan.
  - d. Terdapat penanggungjawab yang jelas.
  - e. Jelas waktu deliverynya
  - f. Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data.
2. Pengukuran kinerja agar dilakukan secara berjenjang dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Indikator-indikator yang ada sudah SMART dan cukup.
  - b. Terdapat alur penjenjangan kinerja yang jelas mulai dari pimpinan sampai dengan staf operasional (individu)
  - c. Setiap jenjang atau tingkatan memiliki indikator kinerja SMART yang formal, setiap jenjang atau tingkatan memiliki target-target terukur
  - d. Terdapat hubungan kausalitas antara setiap jenjang atau tingkatan.
  - e. Terdapat pengukuran kinerja pada setiap jenjangnya.
  - f. Hasil pengukuran dapat diverifikasi atau ditelusuri sampai ke sumbernya.
  - g. Hasil pengukuran berjenjang tersebut sudah divalidasi.
3. Agar melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi dan tingkat instansi dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat.
4. Hasil pengukuran agar dikaitkan dengan reward dan punishment dengan kriteria :
- a. Pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja (tidak jelas kinerjanya).
  - b. Pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang baik mencapai target.
  - c. Pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai)
  - d. Pejabat/pegawai dengan capaian diatas standar dengan yang standar.

### C. Pelaporan Kinerja

- 1. Laporan Kinerja agar menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- 2. Informasi dalam Laporan Kinerja agar sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan dengan maksud berdampak kepada perbaikan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian

kinerja yang disusun. Selanjutnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan organisasi, digunakan untuk peningkatan kinerja berupa dapat mengakibatkan perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan dapat menyimpulkan keberhasilan dan kegagalan program secara terukur. Terakhir dapat digunakan untuk penilaian kinerja secara maksimal dengan maksud informasi capaian kinerja yang disajikan dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment.

### **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :  
Efisiensi = Input Target/Input Aktual  $\geq$  1

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2020		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2020		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Nilai Evaluasi AKIP	70	65,25	93,21%	8.140.000	8.100.000	9,50%
Persentase rata-rata capaian kinerja			93,21%	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		99,50%
<b>Tingkat Efisiensi =</b>			<b>0,93 ( efisiensi tidak tercapai)</b>			

*Tabel 36. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya*

#### D. REALISASI ANGGARAN

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Awal (RP)	Anggaran Perubahan (RP)	Realisasi Anggaran Perubahan (RP)	Persentase (%)
1.	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/pertanian)</b>	<b>1.498.132.600</b>	<b>696.821.500</b>	<b>664.215.330</b>	<b>95,32</b>
	➤ Penanganan Daerah Rawan Pangan	123.048.800	27.125.300	24.637.727	90,83
	➤ Penyusunan data base potensi produksi pangan	26.284.800	550.000	550.000	100
	➤ Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	128.948.800	31.035.000	27.790.000	89,54
	➤ Pemantauan dan Analisis akses pangan masyarakat	87.744.400	30.296.200	26.779.200	88,39
	➤ Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	184.812.800	24.725.000	22.430.000	90,71
	➤ Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	360.760.000	337.425.000	332.765.803	98,61
	➤ Pengembangan Lumbung Pangan Desa	120.969.500	48.725.000	45.755.000	93,90
	➤ Pengembangan Desa Mandiri Pangan	309.122.500	171.445.000	159.902.600	93,26
	➤ Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	119.891.000	17.355.000	15.505.000	89,34
	➤ Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	36.550.000	8.140.000	8.100.000	99,50

Tabel 37. Realisasi Anggaran

#### E. ANALISIS EFISIENSI

NO	Program/ Kegiatan				Efisiensi/ tidak
		Realisasi Anggaran Perubahan (RP)	% Keuangan	% Fisik	
1.	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/pertanian)</b>	<b>664.215.330</b>	<b>95,32</b>	<b>100</b>	<b>Efisiensi</b>
	➤ Penanganan Daerah Rawan Pangan	24.637.727	90,83	100	Efisiensi

➤	Penyusunan data base potensi produksi pangan	550.000	100	100	Efisiensi
➤	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	27.790.000	89,54	100	Efisiensi
➤	Pemantauan dan Analisis akses pangan masyarakat	26.779.200	88,39	100	Efisiensi
➤	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	22.430.000	90,71	100	Efisiensi
➤	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	332.765.803	98,61	100	Efisiensi
➤	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	45.755.000	93,90	100	Efisiensi
➤	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	159.902.600	93,26	100	Efisiensi
➤	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	15.505.000	89,34	100	Efisiensi
➤	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	8.100.000	99,50	100	Efisiensi

*Tabel 38. Analisis Efisiensi*

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Laporan Kinerja menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, Laporan Kinerja menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, Laporan Kinerja akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Indikator Kinerja., capaian kinerja prjanjian Kinerja tahun 2020, dari 8 indikator, sebanyak 6 Indikator berhasil memperoleh nilai diatas 91% (sangat tinggi). Keenam indikator tersebut yaitu Jumlah ketersediaan Energi dan protein Kap/hari, persentase kecamatan kategori rawan pangan, berdasarkan peta komposit SKPG, jumlah nagari yang memiliki sarana lumbung pangan, jumlah nagari mandiri pangan, Skor Pola Pangan harapan (PPH) Konsumsi pangan berdasarkan angka kecukupan gizi, dan Nilai evaluasi AKIP. Nilai pencapaian 51-65% (rendah) sebanyak satu indikator yaitu jumlah penyediaan cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Nilai pencapaian nilai <50 (sangat rendah) sebanyak 1 indikator yaitu Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan. 2 indikator yang capaian sangat rendah disebabkan karena tidak sanggupnya pemda untuk pengadaan cadangan pangan dengan sesuai target dan juga disebabkan oleh refocussing dana yang digunakan untuk penanggulangan bencana virus covid-19.

Upaya perbaikan telah dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan SKPD lain dan pihak-pihak terkait, mengoptimalkan sumberdaya yang ada serta memperbaiki fungsi manajemen mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Namun demikian, beberapa tantangan dan isu-isu ketahanan pangan masih menjadi focus perbaikan kinerja Dinas pangan kedepannya. Pertama, walaupun pencapaian IKU sudah baik, namun belum semua permasalahan ketahanan pangan di masyarakat terjawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini

terutama nampak pada aspek ketersediaan bahan pangan dimana saat ini kondisi lahan yang semakin sempit akibat pembangunan. Kondisi ini diperparah dengan sering terjadinya bencana banjir, longsor dan kekeringan diluar kontrol manusia. Peran Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota sangat diperlukan sebagai institusi yang melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar ketersediaan bahan pangan tetap stabil.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Tanjung Pati, Januari 2021

**KEPALA DINAS PANGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**GUSDIAN LAORA, SKM, M.SI**  
**Pembina Utama Muda /IV.c**  
NIP.19650827 198803 1 004